

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA
TAHUN 2022**



**Gedung Samin Surosentiko, Jl. Pemuda No. 12 Blora Jawa Tengah
TELEPON: 0296525080**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko. Tata Kelola pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) ini, didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transparency, (Transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Accountability, (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Responsibility, (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independency, (Independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara professional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Fairness, (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang lazim disebut dengan Good Corporate Governance (GCG), maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola Perumda BPR Bank Blora Artha Tahun 2022.

Perumda BPR Bank Blora Artha sampai saat ini selalu berupaya untuk berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan untuk melaksanakan Visi dan Misi yang merupakan landasan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang lebih baik (Good Corporate Governance).



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	ARIEF SYAMSUHUDA
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank serta melakukan pembinaan dan pengendalian b. Menyusun strategi dan rencana kerja (Rencana Bisnis Bank (RBB)) untuk mencapai anggaran; c. Terkoordinasinya semua aktivitas, baik bagian pemasaran, pendanaan, perkreditan, operasional, pengawasan dan Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya; d. Tercapainya pertumbuhan tingkat kesehatan, tingkat laba, rasio kredit bermasalah dan efisiensi pada tingkat optimal; e. Terjaminnya pelaksanaan operasional, pemasaran dan pelayanan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; g. Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR dan Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; h. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; i. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT;		
2.	Nama	:	SIGIT ARIE HERYANTO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bersama dengan Direktur Utama dalam penyusunan strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran; b. Bersama Direktur Utama menentukan sasaran-sasaran dan melaksanakan rencana dalam bidang pemasaran, operasional, administrasi, manual perbankan, organisasi, tatalaksana umum serta personalia baik jangka pendek maupun jangka panjang; c. Terkoordinasinya aktivitas bidang pemasaran, operasional dan pelayanan dengan sebaik-baiknya; d. Pencapaian anggaran, kredit dan penghimpunan dana serta hasil operasional sesuai target kerja di setiap bagian; e. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dengan baik, tertib dan lancar, serta aktivitas operasional sesuai ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku;		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
1. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Pengawas diantaranya melakukan evaluasi kinerja kepada semua staf dan PE atau Kabag minimal 1			



- bulan sekali.
2. Melakukan monitoring debitur besar karena bisa berdampak signifikan terhadap NPL
 3. Melakukan monitoring terhadap debitur yang terdampak Covid-19 terutama debitur yang telah dilakukan restrukturisasi karena Covid.
 4. Menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan OJK Tahun 2022 sesuai dengan komitmen

Penjelasan Lebih Lanjut :

Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang cukup lama sehingga fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas kurang optimal.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Mochamad Mutiyono
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan bank secara rutin;		
	2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberikan nasehat kepada Direksi;		
	3. Membuat laporan hasil pengawasan setiap semester kepada pemilik;		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
	1. Untuk selalu dilakukan evaluasi terhadap kinerja untuk semua karyawan secara periodik;		
	2. Memastikan kepada Direksi bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan baik;		
	3. Mempertahankan tingkat kesehatan Bank selalu terjaga dalam posisi sehat;		
	4. Untuk selalu monitoring terhadap debitur besar yang berpotensi bisa menimbulkan NPL;		
Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Tidak ada		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Rp0,00	0%
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	-	-	0%
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mochamad Mutiyono	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mochamad Mutiyono	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mochamad Mutiyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mochamad Mutiyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp770.270.004,00	1	Rp120.845.674,00
2.	Tunjangan	2	Rp502.385.508,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	2	Rp39.885.881,00	2	Rp8.161.102,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp156.628.279,00	1	Rp25.176.103,00
Total			Rp1.469.169.672,00		Rp154.182.879,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang cukup lama sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Dan sampai dengan laporan ini disusu, proses pengisian masih dalam tahap persetujuan dari OJK.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jumlah Direksi ada 2 dan masing- masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan operasional. Sedangkan untuk asuransi kesehatan hanya BPJS Kesehatan.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.45 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pada posisi Desember 2021, jumlah Dewan Pengawas hanya 1 orang sehingga rasio perbandingannya adalah 1:1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04 Januari 2022	7	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target akhir Tahun 2021 2. Penanganan kredit bermasalah 3. Tindak lanjut terkait penggantian core banking system (CBS)
2.	03 Februari 2022	7	Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Januari 2022
3.	07 Maret 2022	7	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Februari 2022; 2. Penanganan kredit bermasalah;
4.	05 April 2022	7	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Maret 2022; 2. Penanganan kredit bermasalah;
5.	19 Mei 2022	3	1. Evaluasi kinerja dan pembinaan rutin; 2. Evaluasi pencapaian target bulan April 2022; 3. Penanganan kredit bermasalah; 4. Pembahasan penyertaan modal disetor dari Pemkab Blora serta inbreng yang rencana akan dipergunakan sebagai kantor pusat; 5. Mengajukan permohonan kepada Pemkab Blora agar Perumda BPR Bank Blora Artha dilibatkan dalam transaksi keuangan daerah terutama dalam penyaluran gaji Perangkat Desa, ADD, pegawai kontrak serta P3K; 6. Akan diadakan study banding terkait BPR dalam penanganan keuangan daerah di BAPAS 69 Magelang dan BAPAS Kulonprogo;



			7. Digitalisasi perbankan.
6.	02 Agustus 2022	7	Evaluasi kinerja, pembinaan serta pencapaian target sampai dengan bulan Juli 2022;
7.	05 Agustus 2022	11	Pembahasa usulan rencana hapus buku kredit
8.	05 September 2022	8	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Agustus 2022; 2. Pembahasan RBB Tahun 2023.
9.	03 Oktober 2022	8	Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan September 2022
10.	02 November 2022	8	Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Oktober 2022
11.	02 Desember 2022	8	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan November 2022; 2. Pembahasan final untuk target RBB Tahun 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dalam 1 tahun lebih fokus pada evaluasi kinerja, penanganan kredit bermasalah serta monitoring terhadap debitur terdampak Covid 19			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mochamad Mutiyono	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas, sehingga jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu). Untuk pelaksanaan rapat Anggota Dewan Pengawas dilakukan bersama dengan Direksi dan pejabat Bank.				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							



L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Januari 2022	Sosial	Sumbangan kegiatan sosial HUT SMAN 2 Blora	SMAN 2 BLORA	Rp1.000.000,00
2.	06 Januari 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk pelaksanaan kunjunga AAL Surabaya ke Kab. Blora	Pemkab Blora	Rp500.000,00
3.	07 Januari 2022	Sosial	Sumbangan sosial pelaksanaan gebyar Kormi dan Jumat berkah Kab. Blora	Pemkab Blora	Rp1.147.000,00
4.	21 Januari 2022	Sosial	Pembelian sembako untuk nasabah	Nasabah	Rp102.000,00
5.	18 Februari 2022	Sosial	Bantuan dalam rangka bakti sosial FPMB	FPMB	Rp500.000,00
6.	14 Maret 2022	Sosial	Dana sosial partisipasi HUT RSUD Dr.R.Soetijono Blora	RSUD Dr.R.Soetijono Blora	Rp1.000.000,00
7.	28 April 2022	Sosial	Pembelian 50 buah paket sembako	Fakir Miskin di Wilayah Kabupaten Blora	Rp6.000.000,00
8.	09 Mei 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk siswa berprestasi SMAN 2 Blora	Siswa berprestasi SMAN 2 Blora	Rp2.400.000,00
9.	15 Juni 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk pembangunan Masjid Nurul Huda Tempellemahbang Japon	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda	Rp500.000,00
10.	29 Juli 2022	Sosial	Sumbangan sosial pembelian sapi untuk qurban	Panitia Qurban Pemkab Blora	Rp44.100.000,00
11.	15 Agustus 2022	Sosial	Bantuan sosial anak stunting di wilayah Kab.Blora untuk bulan pertama	Dinas Perlindungan Anak	Rp900.000,00
12.	25 Agustus 2022	Sosial	Bantuan sosial 10 dus air minum total acara Haul Sunan Pojok	Panitia Haul Sunan Pojok	Rp410,00
13.	16 September 2022	Sosial	Sumbangan sosial pengajian akbar dalam rangka Maulud Nabi Muhammad SAW di Kab. Blora	Panitia Pengajian Kab. Blora (Bagian Kesra Setda Blora)	Rp1.000.000,00
14.	28 September 2022	Sosial	Bantuan sosial anak stunting di wilayah Kab.Blora untuk bulan	Dinas Perlindungan Anak Kab. Blora	Rp900.000,00



			kedua		
15.	30 September 2022	Sosial	Bantuan sosial anak yatim kab. Blora	Panti asuhan anak yatim Kab. Blora	Rp1.000.000,00
16.	24 Oktober 2022	Sosial	Bantuan sosial anak stunting di wilayah Kab.Blora untuk bulan ketiga	Dinas Perlindungan Anak Kab. Blora	Rp900.000,00
17.	24 November 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk korban gempa Cianjur via Perbamida	Perbamida	Rp1.000.000,00
18.	28 Desember 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk korban gempa Cianjur via Perbarindo	Perbarindo	Rp1.000.000,00
19.	05 Desember 2022	Sosial	Sumbangan sosial untuk HUT KORPRI Kab.Blora	KORPRI Kab. Blora	Rp2.000.000,00
20.	06 Januari 2023	Sosial	Sumbangan untuk bakti sosial Kab. Blora	Panitia Bhakti Sosial	Rp300.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Semua kegiatan sosial diatas dibiayai dari anggaran perusahaan pada pos Biaya Non Operasional Lainnya (Sumbangan)					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA
Alamat	: Gedung Samin Surosentiko, Jl. Pemuda No. 12 Blora Jawa Tengah
Nomor Telepon	: 0296525080
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp9.587.774.582,00
Total Aset	: Rp128.836.868.855,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.5 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.02	0.204
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.24	0.336
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.61	0.161
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.45	0.145
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.40	0.140
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	2.07	0.155
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.50	0.113
Nilai Komposit			1.500
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.02)

Direksi berjumlah 2 orang. Modal inti Bank masih dibawah Rp. 50Miliar sehingga salah satu Direksi merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam hal ini dirangkap oleh Direktur Utama. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak ikut serta dalam penyaluran dana, akan tetapi bertanggung jawab terhadap kualitas penyalurannya. Semua Direksi telah lulus fit and proper test dari OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.24)

Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang lama, sehingga fungsi pengawasannya tidak optimal. Pihak BPR telah menginformasikan dan mengusulkan kepada pemilik sebelum masa jabatannya habis, akan tetapi sampai dengan laporan ini disusun belum terisi, dan masih proses administrasi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Nihil

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Selama periode laporan ini disusun, belum pernah terjadi suatu tindakan atau kebijakan dari Direksi yang mengandung benturan kepentingan. Direksi telah menyusun dan mengkinikan kebijakan terkait benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.61)

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan dengan baik, Dimana Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan karena modal inti masih dibawah Rp. 50 Miliar. Dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh PE Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.45)

Bank telah mempunyai PE audit intern dalam hal ini SPI yang telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Laporan hasil audit internal telah disampaikan kepada Direksi, Dewan Pengawas serta OJK

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Bank telah menunjuk dan menugaskan Audit Eksternal (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, dimana Audit Eksternal tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pemilik, dalam hal ini Bupati Blora. Dan laporan hasil audit tersebut telah disampaikan dan dilaporkan kepada OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.4)

Perumda BPR Bank Blora Artha telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan , dimana penilaiannya dalam bentuk profil risiko. Laporan profil Risiko telah disampaikan kepada OJK secara semesteran

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)



Perumda BPR Bank Blora Artha telah memiliki prosedur tertulis mengenai BMPK, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian kredit agar tidak melanggar ketentuan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.07)

Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh pemilik serta telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik sangat mendukung RBB yang telah disusun, akan tetapi dukungan dalam hal penambahan setoran modal sangat kurang, sehingga dapat berpengaruh TKS Bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. Bank telah menyusun laporan keuangan baik laporan bulanan maupun laporan publikasi dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian dan analisis terhadap seluruh aspek serta indikator penilaian penerapan tata kelola Perumda BPR Bank Blora Artha Tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan, dimana tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
2. Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang cukup lama, sehingga fungsi pengawasannya belum bisa berjalan optimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian TKS terutama manajemen Bank.
3. Semua ketentuan dan kebijakan telah disusun dan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat menjadi pedoman dalam semua kegiatan operasional perusahaan.
4. Tambahan setoran modal dari pemilik sangat dibutuhkan karena untuk memperkuat permodalan Bank (CAR)
5. Perumda BPR Bank Blora Artha berupaya untuk selalu menerapkan budaya kepatuhan
6. Dari hasil penilaian penerapan tata kelola BPR diperoleh nilai komposit 1,5 dengan predikat SANGAT BAIK. Dibandingkan dengan penilaian lebih baik dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan nilai komposit sebesar 0,1 dari nilai komposit 1,6 meskipun predikat masih sama yaitu SANGAT BAIK. Kedepannya, Bank akan senantiasa mengupayakan agar penilaian tata kelola selalu meningkat lebih baik dari penilaian sebelumnya.

Berdasarkan analisis atas seluruh kriteria Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dapat disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. BPR telah memenuhi sebagian besar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara cukup memadai. Struktur Tata Kelola BPR cukup memadai, proses pada sebagian besar faktor cukup efektif dan hasil penerapan tata kelola dari keseluruhan faktor sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.



BLORA, 19 Januari 2023

PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA



MOCHAMAD MUTIYONO
Anggota Dewan Pengawas



Menyetujui



ARIEF SYAMSUHUDA
Direktur Utama